

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu perusahaan atau badan usaha sangat bergantung pada profesionalitas manajemen dalam rangka untuk memajukan dan meningkatkan produktivitas kegiatan usahanya. Peran manajemen dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan laporan-laporan perusahaan khususnya laporan keuangan adalah hal yang sangat penting. Laporan keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan harus akurat dan tepat waktu agar keputusan yang akan dihasilkan juga lebih tepat sasaran. Laporan keuangan akan menjadi lebih bermanfaat apabila dengan informasi tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang, sehingga disinilah laporan keuangan tersebut sangat diperlukan.

Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang kemudian dengan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Semakin baik kualitas laporan keuangan yang disajikan maka akan semakin meyakinkan pihak eksternal dalam melihat kinerja keuangan perusahaan tersebut. Lebih jauh keyakinan bahwa perusahaan diprediksikan akan mampu tumbuh dan memperoleh profitabilitas secara *sustainable* (berkelanjutan), yang otomatis tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan perusahaan akan merasa puas dalam berbagai urusan dengan perusahaan. Karena salah satu hal yang

dihindari oleh pihak eksternal adalah timbulnya *bad debt* atau piutang tak tertagih (Fahmi, 2012: 2).

Laporan keuangan yang baik seharusnya dapat dihasilkan tepat waktu, memuat kebijakan yang diperlukan, teliti dan benar atau dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Manajemen dapat meletakkan kepercayaannya terhadap laporan keuangan yang akan digunakan, apabila dilakukan pemeriksaan dan pengendalian yang terus menerus atau berkesinambungan yang sering disebut dengan sistem pengendalian intern.

Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No. 60 tahun 2008 dalam Mohamad, 2012: 2). Pengendalian intern yang digunakan dalam suatu entitas merupakan faktor yang menentukan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas (Mulyadi, 2002: 179). Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat prosedur-prosedur mekanis untuk memeriksa ketelitian data administrasi dalam hal ini laporan keuangan. Dalam arti yang luas, sistem pengendalian intern dapat dipandang sebagai sistem sosial (*social system*) yang mempunyai wawasan/makna khusus yang berada dalam organisasi perusahaan. Sistem tersebut terdiri dari kebijakan, teknik, prosedur, alat-alat fisik, dokumentasi orang-orang dengan berinteraksi satu sama lain diarahkan untuk: (a) melindungi harta; (b) menjamin

terhadap terjadinya utang yang tidak layak; (c) menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya data akuntansi; (d) dapat diperolehnya operasi secara efisien dan (e) menjamin ditaatinya kebijakan perusahaan (Hartadi, 1999: 3).

Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tiga golongan yaitu: (1) keandalan informasi keuangan; (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan (3) efektivitas dan efisiensi operasi (Mulyadi, 2002: 180). Pengendalian intern yang baik sangat diperlukan dalam suatu entitas atau badan usaha untuk meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas laporan keuangan terutama dalam rangka pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 adalah sebagai lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersil, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2002 TVRI masih dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2005, dialihkan bentuknya menjadi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI) sebagai badan hukum yang didirikan oleh negara. Dengan pengalihan bentuk ini, PT TVRI (Persero) dinyatakan bubar dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai PT TVRI (Persero) yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada LPP TVRI. Dengan peraturan pemerintah ini, TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik yang menyelenggarakan kegiatan

penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. TVRI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tempat kedudukan TVRI di ibu kota negara Republik Indonesia dan stasiun penyiarnya berada di pusat dan daerah. TVRI mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, LPP TVRI baik sebagai suatu entitas maupun unit atau cabang selain mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, juga diberikan hak untuk menerima dan mengelola sumber pendapatan yang berasal dari jasa siaran dan non siaran (Jasinonsi). Sehingga laporan keuangan yang diterbitkan terdiri atas laporan keuangan APBN dan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan APBN diperlukan untuk menghitung pertanggungjawaban keuangan yang dibiayai oleh APBN sehingga dapat dikompilasikan dengan Unit Kerja Eselon I. Penyusunan laporan keuangan APBN mengacu pada PP. No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di sisi lain, laporan keuangan komersial diperlukan untuk menghitung pendapatan dan biaya usaha dari hasil kegiatan komersial. Penyusunan laporan keuangan komersial mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

LPP-TVRI Stasiun Gorontalo saat ini menjalankan fungsi sebagai Stasiun Penyiaran Daerah Tipe C. Dalam menyelenggarakan kegiatan produksi

dan penyiaran, LPP-TVRI Stasiun Gorontalo diberikan kesempatan untuk mengelola siaran lokal 4 jam per hari dalam mata acara informasi dan berita lokal, dialog interaktif (*live program*), pendidikan dan agama serta budaya dan hiburan, kemudian juga menyusun laporan keuangan APBN yang disampaikan ke kantor pusat sebagai Eselon I dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Gorontalo, dan laporan keuangan komersial yang disampaikan ke kantor pusat.

Beberapa hal yang masih menjadi penghambat produktifitas kegiatan operasional di lingkungan LPP-TVRI Stasiun Gorontalo terkait dengan pengendalian intern adalah sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil audit tim Satuan Pengawasan Intern LPP-TVRI Nomor: 24/LHA/RTN/1.7/TVRI/2011 pada tanggal 15 Desember 2011 untuk periode 1 September sampai dengan 31 Desember 2010 dan 1 Januari sampai dengan 31 September 2011, berupa pemeriksaan rutin baik di bidang penyelenggaraan program siaran, pengelolaan administrasi pendapatan dan pengeluaran keuangan maupun pemberdayaan umum. Adapun hasil temuan tim tersebut yang sampai saat ini masih belum ditindaklanjuti secara maksimal antara lain buku pembantu kasir dana APBN dan Non APBN yang dikelola oleh Bendahara belum memadai, karena semua penerimaan dan pengeluaran dicatat namun belum sesuai prosedur, fungsi pengelolaan uang dilakukan oleh satu orang, *filling system* keuangan yang belum tertata secara aman sebagai dokumen negara, adanya panjar kerja yang belum dipertanggungjawabkan, penyetoran dan pelaporan pajak belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pertanggungjawaban paket produksi belum memadai,

peran pejabat pembuat komitmen (PPK) belum optimal dalam kuitansi pertanggungjawaban.

Selain itu, permasalahan lainnya khususnya di bagian keuangan dalam membuat atau menghasilkan laporan keuangan antara lain disebabkan oleh kurangnya tenaga atau karyawan pada bagian keuangan saat ini yang dapat memperlambat kinerja dalam menghasilkan laporan keuangan sehingga penyampaiannya sering terlambat, disamping kemampuan tenaga operasionalnya juga belum sepenuhnya memadai. Peran manajemen dalam melakukan pengendalian intern masih minim, karena selalu mengandalkan hasil audit internal yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal dari Kantor Pusat sekali dalam setahun. Dengan demikian kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga belum maksimal.

Setiap perusahaan harus melakukan pengendalian intern untuk memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangannya yakni benar-benar menggambarkan posisi keuangan yang sebenarnya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan pada tingkatan manajemen untuk menggunakan laporan keuangan tersebut dalam hal pengambilan keputusan dan pertimbangan investasi oleh pihak eksternal perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pada LPP TVRI Stasiun Gorontalo.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh TVRI Stasiun Gorontalo dalam hal pengendalian intern sebagai berikut:

- a. Belum adanya pemisahan fungsi pengelolaan uang antara bagian pencatatan akuntansi dengan bagian kasir.
- b. Arsip keuangan yang belum tertata secara aman sebagai dokumen negara.
- c. Peran pejabat keuangan belum optimal dalam hal otorisasi pertanggungjawaban.
- d. Kemampuan tenaga operasional keuangan yang belum memadai
- e. Penyampaian laporan keuangan yang belum tepat waktu.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada LPP-TVRI Stasiun Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pada LPP TVRI Stasiun Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai sarana pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu akuntansi terutama dalam memahami kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan.
- 2) Menjadi bahan perbandingan atau referensi tambahan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang terkait dengan pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi pihak yang berkepentingan terutama manajemen LPP-TVRI Stasiun Gorontalo dan Kantor Pusat dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengendalian intern di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.